

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN
 SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2014 KEPADA 12 (DUA
 BELAS) GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL
 PEMERINTAH

No	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilimpahkan		
	Pelaksana	Program/Kegiatan	Keterangan
1	Gubernur Provinsi Aceh	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
2	Gubernur Provinsi Riau	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
3	Gubernur Provinsi Sumatera Barat	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilimpahkan		
	Pelaksana	Program /Kegiatan	Keterangan
4	Gubernur Provinsi Sumatera Selatan	A. Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
5	Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	A. Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
6	Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah	A. Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
7	Gubernur Provinsi Sulawesi Utara	A. Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilimpahkan		
	Pelaksana	Program /Kegiatan	Keterangan
		Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
8	Gubernur Provinsi Gorontalo	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
9	Gubernur Provinsi Sulawesi Barat	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
10	Gubernur Provinsi Maluku Utara	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
11	Gubernur Provinsi Papua	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilimpahkan		
	Pelaksana	Program/Kegiatan	Keterangan
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
12	Gubernur Provinsi Papua Barat	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI